

**SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DANA DESA DAN  
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
DESA (STUDI DI *GAMPONG* LAMPEUDEU BAROH  
KECAMATAN PIDIE KABUPATEN PIDIE)**



**Disusun Oleh:**

**ZULFADZAL  
NIM. 150602200**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M /1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zulfadzal  
NIM : 150602200  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

; Menyatakan,

  
  
Zulfadzal

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**

Disusun Oleh:

Zulfadzal  
NIM. 150602200

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si.Ak.CA  
NIP. 19830709 201403 2 002

  
Dara Amanatillah, M.Sc.Finn  
NIDN. 2022028705

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**SKRIPSI**

**Zulfadzal**

**NIM. 150602200**

Dengan Judul:

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat  
Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa  
(Studi di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten  
Pidie)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi  
Syari'ah

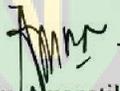
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020 M  
19 Jumadal Awwal 1441 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris.

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si.Ak. CA  
NIP. 19830709 201403 2 002

  
Dara Amanatillah, M.Sc.Finn  
NIDN. 2022028705

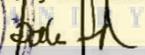
Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP. 19720423 200501 1 003

  
Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulfadzal  
NIM : 150602200  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : zulfadzalr@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media, formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. جامعة الرانيري

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Januari 2020

Mengetahui,

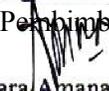
Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Zulfadzal

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si. Ak. CA

  
Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

NIM. 150602200

NIP. 198307092014032002

NIDN. 2022028705

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi fi Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)”**. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. terselesaikannya penelitian hingga penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah

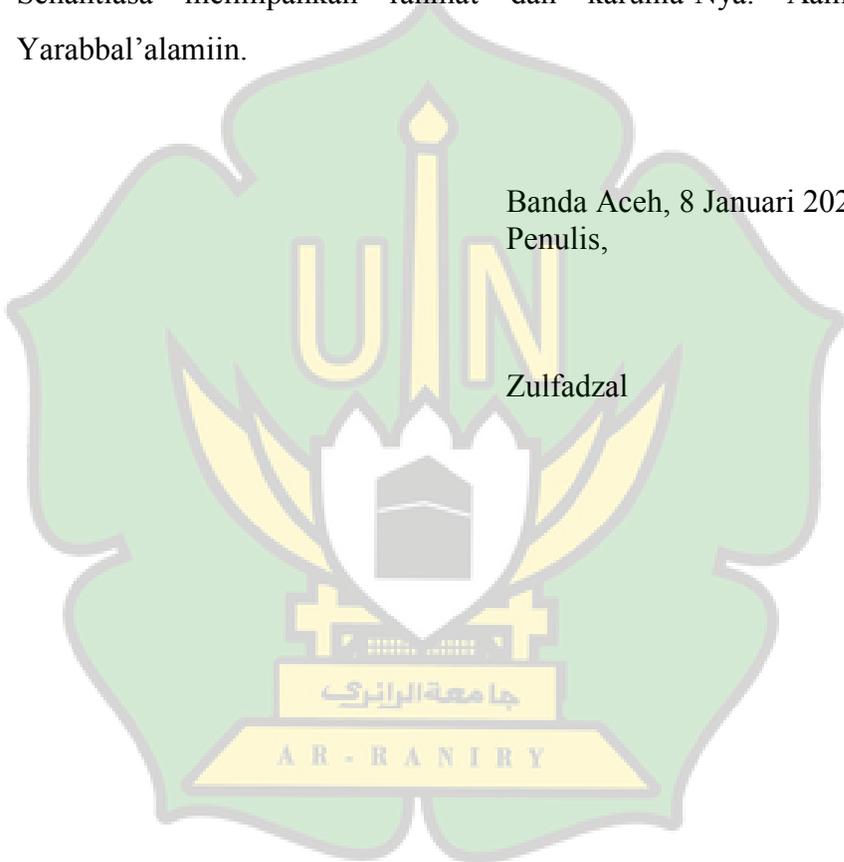
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku ketua Laboratorium beserta Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. CA dan Amanatillah, M. ScFinn selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai sebagai mana mestinya
5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
6. Kedua orang tua tercinta, Rusli AR. dan Wannur Idiati yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, motivasi tentang begitu berratinyakerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yng tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Serta kelima kakak saya yang tersayang Lina, Leni, Linda, Hendra dan Aidil yang telah memberikan semngat, dukungan dan doa.
7. Karol yang telah mendukung dan membantu saya baik pikiran maupun doa dalam membantu saya menyelesaikan tugas akhir.
8. Sahabat-sahabat Pak T, Rifki, Zulvan dan Fajar terbaik atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi. Serta sahabat-sahabat

seperjuangan Yudi, Iqbal. Bilal, Rozi, Ayek, Noval. Abbad serta teman-teman jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin Yarabbal'alamiin.

Banda Aceh, 8 Januari 2020  
Penulis,

Zulfadzal



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Zufadzal  
NIM : 150602200  
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)  
Tanggal Sidang : 15 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 117  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. CA  
Pembimbing II : Amanatillah, M. ScFinn

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Lampeudeu Baroh”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana terhadap pembangunan infrastruktur di Gampong Lampeudeu Baroh dan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Gampong Lampeudeu Baroh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis penelitian korelasi. Sampel penelitian 100 orang pelanggan. Teknik pengumpulan data kuesioner. Analisa data menggunakan, uji normalitas, heterogenitas, uji korelasi serta uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y), hal ini sebagaimana hasil uji Fhitung > Ftabel yaitu  $179,526 > 3,09$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa kuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Sedangkan hasil Uji t menunjukkan  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$ , atau  $14,163 > 1,984$ , artinya terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. Begitu juga partisipasi masyarakat berhubungan signifikan dengan pembangunan infrastruktur karena nilai  $t_{hitung} >$

dari  $t_{\text{tabel}}$ , atau  $12,921 > 1,984$ . Jika dilihat hasil analisis koefisien determinasi terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 67,2%, sedangkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 63,0%.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Akuntabilitas .....	8
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	8
2.1.2 Indikator Akuntabilitas .....	9
2.3 Dana Desa .....	12
2.2.1 Transparansi Dana Desa .....	13
2.2.2 Pencairan Dana Desa .....	13
2.2.3 Pengelolaan Dana Desa .....	14
2.3 Partisipasi .....	16
2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi .....	18
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Partisipasi .....	18
2.4 Pembangunan .....	20
2.5 Infrastruktur .....	20

2.5.1 Jenis Pembangunan Infrastruktur.....	21
2.7 Penelitian Terdahulu.....	22
2.8 Kerangka Pemikiran.....	25
2.9 Pengembangan Hipotesis.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.3.1 Populasi.....	27
3.3.2 Sampel.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5.1 Kuesioner.....	28
3.6 Variabel Penelitian.....	30
3.7 Definisi Operasional.....	31
3.7.1 Akuntabilitas.....	32
3.7.2 Partisipasi.....	32
3.7.3 Pembangunan.....	32
3.8 Teknik Analisis Data.....	32
3.8.2 Analisis Data.....	32
3.9 Metode Analisis Data.....	33
3.9.1 Uji Asumsi Klasiks.....	34
3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
3.11 Pengujian Hipotesis.....	36
3.11.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji <i>t</i> ).....	36
3.11.2 Uji Koefisien Determinasi $r^2$ .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum.....	38
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Uji Validitas dn Reabilitas Instrumen.....	41
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	43
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
4.3.3 Pengujian Hipotesis.....	47
4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi.....	50

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah/ besaran dana desa Lampeudeu Baroh tahun 2018 .....	4
Tabel 2.1	Peningkatan Jumlah Dana Desa.....	14
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1	Skala Penilaian Jawaban Angket.....	29
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Variabel Penelitian.....	30
Tabel 4.1	Sarana dan Prasarana Gampong Lampeudeu Baroh .....	39
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Gampong Lampeude Baroh.....	39
Tabel 4.3	Penduduk Berdasarakan Pendidikan Gampong Lampeudeu Baroh .....	40
Tabel 4.4	Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Gampong Lampeudeu Baroh .....	40
Tabel 4.5	Uji Validitas.....	41
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas.....	43
Tabel 4.7	Uji Normalitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) .....	43
Tabel 4.8	Uji Normalitas Partisipasi Masyarakat (X2).....	44
Tabel 4.9	Uji Normalitas Pembangunan Infrastruktur (Y) ....	44
Tabel 4.10	Uji Multikolinieritas .....	46
Tabel 4.11	Uji Heteroskedastisitas .....	46
Tabel 4.12	Analisis Regresi Linear Berganda .....	47
Tabel 4.13	Uji F.....	48
Tabel 4.14	Uji T Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur .....	49
Tabel 4.15	Uji T Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur .....	50
Tabel 4.16	Analisis Koefisien Determinasi Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur .....	51
Tabel 4.17	Koefisien Deterinasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Akan tetapi pembangunan di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata yang berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas tentang dana desa.

Abidin (dalam Dianti Lalira, 2018: 63) dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperuntukkan bagi desa di transfer melalui

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Nugroho (dalam Fahri, 2017: 78) menjelaskan kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya sangat dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani (2017: 68) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Aprisiami Putriyanti (dalam Lina Nasihatun, 2015: 214) pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Nugroho (dalam Fahri, 2017: 78) bahwa dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang proses bisnisnya hampir sama dengan tingkat Pemerintah daerah. ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif. John P. (dalam Fahri, 2017: 76) pun berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan desa.

Dalam sistem pengelolaan, Kepala desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya di gunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan desa. Dengan adanya alokasi dana desa, semua penyelenggaraan desa bisa di laksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat di laksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala desa harus mampu mengelola dana yan telah memberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang di laksanakan dengan menggunakan dana yaitu alokasi dana desa.

Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah di rencanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Alokasi dana desa sebagian memang diperuntukkan untuk pembangunan. Pembangunan salah satu alat penunjang bagi suatu desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi dana desa, rencana atau musyawarah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar.

Pembangunan desa ada berbagai jenis salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Alokasi dana desa diperuntukkan juga bagi pembangunan infrastruktur karena dengan adanya alokasi dana desa ini bisa membantu akan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah dalam membangun desa. Dalam pengelolaannya juga sebaiknya ada keterbukaan supaya dalam pelaksanaannya dapat terlihat jelas bahwa dana yang ada di pakai sesuai dengan program yang telah di sepakati bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena sering terjadi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa kurang dalam penyampaian laporan dana yang telah di pakai dalam menunjang atau mendanai program yang ada. Karena ketika tidak ada laporan yang ada akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan tidak terselesaikan program yang disepakati. Dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan di katakan bahwa harusnya ada sifat transparansi dari pihak pengelola.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman, 2015:255)

Djiwadono (dalam Nurman, 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Pada penelitian ini mengkaji dana desa dan alokasi dana desa pada wilayah desa Lampeudeu Baroh yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang telah menerima dana desa sejak beberapa tahun belakangan dengan besaran dana yg bervariasi, Penulis juga melampirkan besaran dana

desa yang diterima desa Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tahun 2018 sebagai berikut,

**Tabel 1.1**  
**Jumlah/besaran dana desa Lampeudeu Baroh tahun 2018**

NO	GAMPONG	SUMBER DANA (Rp)				JUMLAH
		Dana Gampong	Alokasi Dana Gampong	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = 3+4+5+6</b>
	Lampeudeu Baroh	636,855,078	114,033,347	8,168,025	834,919	759,891,369

Sumber: Dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam keputusan Bupati tahun 2018

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut, Desa Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan dana desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pemerintah desa tidak bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaannya. Masalah mengenai program yang tidak terselesaikan karena adanya pergantian kepala desa yang membuat program ada yang tidak terlaksanakan dengan baik dan tepat. Kondisi seperti ini bisa membuat ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan dari pemerintah desa. Masalah yang

timbul tentang sistem pengelolaan alokasi dana desa yang kurang dipahami oleh berbagai pihak, contohnya masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan di desa. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan di desa harus di kelola dengan baik supaya dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ketika adanya sikap transparansi dari pengelolaan alokasi dana desa, secara jelas dan pasti pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap pengelolaan alokasi dana desa dan telah diprogramkan, perlu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintahan desa yang terbuka kepada masyarakat agar bisa terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap partisipasi masyarakat dengan judul penelitian **“Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrasruktur di Gampong Lampeudeu Baroh?

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Gampong Lampeudeu Baroh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana terhadap pembangunan infrastruktur di Gampong Lampeudeu Baroh.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Gampong Lampeudeu Baroh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait.

1. Manfaat Secara Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggung-jawaban pelaksana, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa khususnya di desa Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah setempat mengenai pengalokasian dana desa.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai bagaimana akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pembangunan pedesaan. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.

## 4. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempergunakan sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi : jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian.

## **BAB IV : HASIL DARI PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Penutup berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Setiawan dkk. (2017), pada dasarnya akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintahan.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Subroto, 2009:27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai – nilai seperti efisiensi,

efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Sulistiyani (2004: 43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Sedangkan Lembaga Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:23) menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Harun (2009:8) ada dua hal yang menjadi sumber pokok akuntabilitas yaitu adanya kapasitas bertindak dari pelaksana tugas, adanya konteks atau ruang lingkup di mana konsekuensi suatu tindakan menjadi perhatian baik dari penerima tanggungjawab (tugas) maupun pelaksana tugas atau seseorang

yang bertanggungjawab. Akuntabilitas akan berjalan jika disertai kapasitas dan kesadaran dari pelaksana tugas serta adanya perhatian serius dari pemberi tugas atas segala akibat dari tugas yang telah dilakukan.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### **2.1.2 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Krina (2003: 10) secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

- a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
  - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
  - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
  - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
  - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
  - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.

- c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002: 21) Undang-Undang desa memuat tiga jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik, yaitu:

1. Akuntabilitas fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horisontal. Pemimpin dari pengendalian yang mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horisontal adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan fiskal vertikal dan horisontal diharapkan terwujud. Indikator akuntabilitas mencakup adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota, menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka menengah dan tahunan di desa; adanya dokumen

laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan ke bupati/walikota menghasilkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan atau realisasi anggaran desa; adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keterangan laporan pertanggungjawaban di desa; ada penerapan sanksi sesuai undang-undang jika gagal melaksanakan poin-poin tersebut.

2. Secara konseptual, akuntabilitas sosial termasuk ke dalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah ke atas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya. Indikator akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta penerapan sanksi apabila gagal menjalankannya.
3. Akuntabilitas birokratik adalah pengendalian internal yang mengarah ke bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin, sedangkan pegawai desa

sebagai agen. Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen rencana anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi menurut UU dan peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya.

## **2.2 Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa Warsono (2014: 75).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui

peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa, menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

### **2.2.1 Transparansi Dana Desa**

Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggung jawabkan secara

administrasi, moral dan hukum. Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (DJBPD, 2016).

### 2.2.2 Pencairan Dana Desa

Besarnya anggaran dana desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dari 20.766,2 Triliun Rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 triliun Rupiah di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 triliun Rupiah dan diperkirakan hingga tahun 2019 anggaran dana desa ini akan mencapai 111.840,2 triliun Rupiah (DJPK, 2015). Kenaikan ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Peningkatan Jumlah Dana Desa**

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa (DD)	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-Rata DD per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 juta	1.400,8 juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI tahun 2019.

Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan

Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

Pencairan dana desa ini dilakukan melalui rekening kas desa. Pencairan dana desa dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

### **2.2.3 Pengelolaan Dana Desa**

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:534) Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Adapun siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi:

1. Penyiapan Rencana
2. Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
3. Penetapan Rencana berdasarkan pedoman APB Desa
4. Penetapan APB Desa
5. Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola.
6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa.
7. Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (dalam Subroto, 2009: 31) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah

secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain (Mardiasmo, 2002: 106).

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

### **2.3 Partisipasi**

Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015: 68)

Bornby dalam (Theresia, 2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, Adisasmita (2011: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra (2003: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan adanya partisipasi ini suatu tujuan yang telah ditentukan akan tercapai dengan maksimal. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan masyarakat Desa Lampeudeu Baroh

Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut.

Secara konkrit (operasional) partisipasi dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut :

1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik;
2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Sedangkan prinsip-prinsip dari partisipasi menurut Theresia (2014: 207) dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol,

bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.

2. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi**

Slamet dalam Theresia (2014: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Goldsmith dalam Ndraha (1990: 105), menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

### **2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Partisipasi**

Solekhan (2012: 135), mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## 2. Melemahnya Modal Sosial

Menurut Bardhan (dalam Solekhan, 2012:139), modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal social terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Soetrisno dalam Theresia (2014: 211) mengidentifikasi beberapa masalah kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

1. Masalah pertama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
  - a. Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.

- b. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
  - c. Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
  3. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparat) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.

## **2.4 Pembangunan**

Menurut Kartasmita (1996: 37) Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan bukan hanya diarahkan

untuk meningkatkan *income* tetapi juga pemerataan. Pembangunan memiliki tujuan luas yang menyangkut keseluruhan kebutuhan manusia dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Afifudin (2012: 12) Pembangunan adalah sebuah proses perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan segi kehidupan yang lebih luas yang bukan sekedar meningkatkan taraf hidupnya, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya.

Dari pengertian diatas pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, sasaran utama pembangunan adalah manusia dan esensi dari pembangunan tersebut adalah adanya perubahan dari kondisi yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi yaitu adanya peningkatan kualitas hidup.

## **2.5 Infrastruktur**

Infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur umumnya merujuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

American Public Works Association Stone 1974 (dalam Kodoatie, 2010: 487), Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja dengan perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang. Dalam setiap pembangunan jenis infrastruktur tidak dapat terlepas begitu saja terhadap infrastruktur yang sudah ada, maupun kemungkinannya untuk rencana pengembangan kedepan, sehingga perlunya dibuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), RUTR adalah acuan yang perlu dipahami dan secara konsisten harus dapat dilaksanakan sesuai yang ditetapkan. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat.

### 2.5.1 Jenis Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaanya diatur pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur pasar, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, serta infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah.

Sementara itu, Grigg dalam Mustikawati (2016: 5) mengatakan bahwa infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik yang meliputi:

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi.
2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali.
3. Fasilitas manajemen limbah padat.
4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol.
5. Sistem transit public
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi.
7. Fasilitas pengolahan gas alam.

8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi.
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air.
10. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Yanhar Jamaluddin (2018), menganalisis tentang Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. Hal ini disebabkan oleh karena pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan oleh karena Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa yang sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah, diperlukan *intervensi regulation* Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa, mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

M. Ridwan Tikollah, M.Yusuf A. Ngampo (2018), Menganalisis tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengelolaan ADD di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa beserta aparatnya dan laporan pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Mare Kabupaten Bone sejumlah 17 desa. Sampel penelitian dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Desa yang menerima dana ADD tertinggi, (2) Desa yang menerima dana ADD terendah, (3) Desa yang letaknya di Ibu Kota Kecamatan, (4) Desa yang letaknya terdekat dari Ibu Kota Kecamatan Mare, dan (5) Desa yang letaknya terjauh dari Ibu Kota Kecamatan Mare. Berdasarkan kriteria tersebut dipilih lima desa, yakni: Desa Batu Gading, Desa Data, Desa Mario, Desa Lappa Upang, dan Desa Kadai. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan persentase indeks kesesuaian kasar (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas (2015), tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD baik secara teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bukti akuntabilitas secara transparan dan akuntabel, demikian juga dalam pengelolaan alokasi dana desa, terbukti dengan adanya Akuntabilitas. Laporan (LPJ) yang isinya terdapat kwitansi buku kas, pembantu, berita acara dan kegiatan lain yang telah didokumentasikan melalui gambar-gambar yang terlampir dan pembangunan fisik telah dilakukan pembangunan dengan membangun kali batu air irigasi. Realisasi laporan dan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa dikomunikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh adanya lampiran keterikatan realisasi yang telah ditulis. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban untuk pengembangan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon juga telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan-tahapan kegiatan perencanaan dapat dilakukan persiapan dalam bentuk persiapan pengaturan daftar Usulan Kegiatan yang Direncanakan (DURK) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh

Alokasi Dana desa. Namun tujuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Dapurkejambon masih dirasa kurang optimal karena masyarakat kurang merespons dengan baik.

Lutfi Nur Fahri (2017), tentang Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Tujuan penulisan penelitian ini adalah membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa. Metoda analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis *causal effectual* dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Lokasi penelitian adalah di Desa-Desa seluruh wilayah Kabupaten Garut yang disampel berdasarkan tipologi Kecamatan dimana Desa tersebut berada, dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara baik dapat dilakukan dengan mewujudkan manajemen keuangan Desa sehingga meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

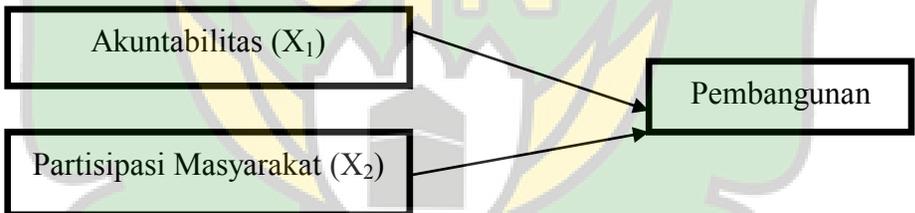
<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Yanhar Jamaluddin (2018)	Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif.	Persamaan mendasar terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang dana desa terhadap pembangunan	Perbedaan mendasar kajian sebelumnya hanya melihat aspek pengelolaan dana desa, sedangkan penulis memfokuskan pada aspek akuntabilitas dari penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. Perbedaan juga terlihat pada lokasi dan metode penelitian, dimana kajian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penulis melihat dua variabel yang berbeda dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
2	M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo (2018)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Metode deskriptif-komparatif dengan persentase indeks kesesuaian kasar (IKK).	Kajian ini memiliki persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang dana desa.	Perbedaan mendasar terlihat pada variabel penelitian, yaitu kajian sebelumnya hanya fokus pada satu variabel yakni pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penulis melihat dua variabel yang saling berhubungan yakni akuntabilitas dengan pembangunan infrastruktur.

					Dalam aspek metode juga terdapat perbedaan yakni dimana kajian sebelumnya bersifat studi komparatif sedangkan penulis menggunakan studi korelasi.
3	Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Analisa bersifat <i>Multigroup Structural Equation Modelling</i> dan model struktural masing-masing.	Kajian ini memiliki persamaan yang mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Persamaan terlihat pada fokus kajian yakni sama-sama mengkaji pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan.	Perbedaan mendasar terlihat pada variabel Pemberdayaan Masyarakat sedangkan penulis fokus pada partisipasi masyarakat.
4	Lutfhi Nur Fahri (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa	Metoda analisis <i>causal effectual</i>	Kajian ini juga memiliki persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang dana desa.	Perbedaannya ialah diman fokus kajian sebelumnya pada hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan

		dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan			Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Sedangkan penulis fokus pada akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
--	--	--	--	--	---

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kajian pustaka diatas, dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



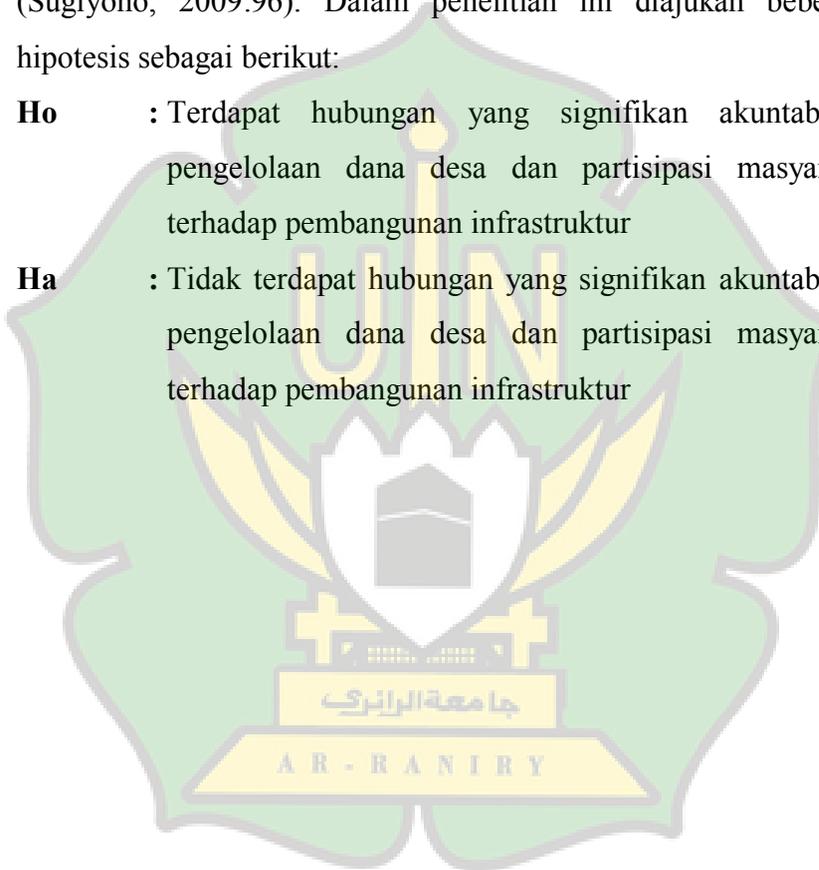
**Gambar 2.1**  
**Kerangka Bepikir**

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur. Dilihat dari segi bagaimana cara pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dana desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

## 2.8 Perumusan Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2009:96). Dalam penelitian ini diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

- Ho** : Terdapat hubungan yang signifikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur
- Ha** : Tidak terdapat hubungan yang signifikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kategori penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa data secara mendalam. Nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan data-data terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Penelitian ini bersifat verifikasi dengan menggunakan data primer untuk menjawab pokok permasalahan dan menjabarkan tujuan penelitian yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data utama penelitian dan melengkapi penjelasan-penjelasan akan penelitian.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie karena daerah tersebut menjadi acuan peneliti untuk meneliti masalah akuntabilitas pengelolaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun pembangunan infrastruktur didesa tersebut. Mengingat desa Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan dana desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa. kisan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) minggu.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Siagian (2011:14) Populasi merupakan unit dimana hasil penelitian nantinya akan diterapkan (digeneralisir). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan objek, benda, peristiwa atau individu yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa mengenal populasi merujuk pada sekumpulan individu atau objek yang memiliki ciri atau sifat yang sama. Tidak seragam namun diantara mereka harus ada persamaan. Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Gampong Lampeudeu Baroh, dan tokoh masyarakat setempat.

#### **3.3.2 Sampel**

Bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti disebut sampel. Sampel berarti contoh, kesimpulan tentang contoh akan sama dengan keseluruhan individu dari mana sampel diambil, karena contoh mempunyai ciri yang sama dengan keseluruhan yang menjadi sumbernya.

Sampel adalah sekumpulan individu yang menjadi bagian dari populasi yang dapat dijangkau sehingga peneliti secara langsung dapat mengumpulkan data atau melakukan pengamatan/pengukuran pada unit ini. Menurut Gay dan Diehl dalam (Indrawan

dan Yaniawati, 2014:102) jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek dan menurut Roscoe ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah 100 responden yang ada di Gampong Lampeudeu Baroh yang memenuhi karakteristik dari penelitian.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala *numeric* (angka). Yakni mengukur nilai satu atau lebih *variable* dalam sampel atau populasi dengan hasil penyajian penelitian dalam bentuk angka atau statistik (Purhantara, 2010:02). Metode ini digunakan untuk mengetahui Dampak Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sedangkan data sekunder berupa hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2011:138). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner.

### 3.5.1 Kuesioner

Data utama yang digunakan dalam kajian ini ialah hasil kuesioner yang diberikan kepada 100 orang sampel untuk mengukur fokus kajian ini. Hal ini sebagaimana makna angket itu sendiri menurut Arikunto (2015) ialah “suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertulis yang dapat secara langsung dijawab oleh responden”. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup berbentuk *skala likert*, dimana responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan di dalam angket sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah hasil angket.

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan *Skala Likert*. Menurut Sugiyono (2014) *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, dengan *skala Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Angket tersebut disebarkan kepada masyarakat Gampong Lampeudeu Baroh. Angket akan disebarkan kepada responden yang terpilih berjumlah 100 orang. Jumlah pertanyaan di dalam

angket sebanyak 25 pertanyaan dimana nomor 1 sampai nomor 10 penulis golongan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara dari nomor 11 sampai nomor 18 pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dan nomor 19 sampai nomor 25 penulis menggolongkan sebagai pembangunan infrastruktur. Penyusunan angket tersebut mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun daftar pertanyaan/pernyataan
2. Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawaban.

Angket yang digunakan merupakan angket tertutup dengan empat alternatif jawaban yaitu:

SS = sangat setuju

TS = tidak setuju

S = setuju

STS = sangat tidak setuju

CS = Cukup Setuju

**Table 3.1**  
**Skala Penilaian Jawaban Angket**

<b>Alternative jawaban</b>	<b>Bobot nilai</b>
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014)

### 3.6 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) variabel penelitian merupakan “segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan-nya”. Variable

merupakan pusat perhatian di dalam penelitian kuantitatif. Secara singkat variable dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari suatu nilai. Menurut Sangadji (2013), variabel adalah konstrak yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas ( $X_1$ ) dan partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) dan Variabel terikat (Y) dalam kajian ini ialah pembangunan infrastruktur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Kisi-Kisi Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Indikator
1	Akuntabilitas	<b>Pembuatan Keputusan</b>
		1. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
		2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
3. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban		

		<p>jika standar tersebut tidak terpenuhi</p> <p>4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.</p> <p>5. adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD.</p> <p><b>Sosialisasi Kebijakan</b></p> <p>1. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal</p> <p>2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program</p> <p>3. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat</p> <p>4. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.</p> <p>5. Pelaksanaan dan pengambilan kebijakan harus sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.</p>
2	Partisipasi Masyarakat	<p>1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan</p>

		<p>sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.</p> <p>2. Adanya kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.</p> <p>3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.</p> <p>4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>5. Pemerintah harus menyediakan ruang publik dalam mengambil kebijakan yang melibatkan masyarakat.</p> <p>6. Masyarakat harus memiliki keiginan dalam mengawasi kinerja pemerintah.</p> <p>7. Pemerintah harus melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja.</p> <p>8. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
3	Pembangunan Infrastruktur Desa	<p>1. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes dan posyandu.</p> <p>2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD, TK, TPA, dan Kelompok Bermain)</p> <p>3. Pembangunan dan pemeliharaan</p>

		tempat ibadah
		4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
		5. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi
		6. Pembangunan dan pemeliharaan tanggul
		7. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga

### 3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi masing-masing variabel yaitu :

#### 3.7.1 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Subroto, 2009:27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui

prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban

### **3.7.2 Partisipasi**

Davis (2000:142) Didalam bukunya menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya. Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat Lampeudeu Baroh dalam melaksanakan pembangunan Gampong Lampeudeu Baroh melalui penggunaan dana desa.

### **3.7.3 Pembangunan**

Menurut Mohammad Ali, Pembangunan adalah setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia. Dalam penelitian ini pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan dalam wilayah Gampong Lampeudeu Baroh.

## **3.8 Teknik Analisis Data**

### **3.8.1 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu data yang dapat diwujudkan dengan angka yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian kuantitatif yang

dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab-akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut dengan paradigma penelitian.

Jadi paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen.

Adapun data kuantitatif ini dianalisis oleh penulis dengan menggunakan statistik. Rumus yang digunakan adalah rumus *t-test* atau uji t dan uji *paired samplet-test*. Karena yang digunakan rumus t, rumus t banyak ragamnya dan pemakaiannya disesuaikan dengan karakteristik data yang akan dibedakan. Tahapan menggunakan uji *pairedsamplet-test* yaitu:

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014: 125) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan demikian data yang valid adalah

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien korelasi  $r = 0,3$ . Jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”.

## 2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang (Sudjana, 2005) Pengukuran reliabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus alpha ronbach, apabila nilai  $\alpha > 0.70$  maka instrument yang digunakan adalah reliable.

### 3.9 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kuantitatif merupakan hasil pengolahan data atas jawaban yang diberikan responden terhadap pernyataan dari setiap item kuesioner. Setelah data dari seluruh responden terkumpul, maka peneliti melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data digunakan juga untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti, karena analisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen ( $X_1, X_2$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ).

### 3.9.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan empat uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas

Selain uji asumsi klasik multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2016:92). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov*, menurut Singgih Santosa (2012:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significanted*), yaitu:

- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain (Sunyoto, 2016:90). Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu, dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah distudentized (Ghozali, 2013: 139). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

## 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ( $X_{1,2,3,\dots,n}$ ) di mana akan diukur keeratan

hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ ). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Sunyoto, 2016:87). Indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen (Imam Ghazali, 2013:105). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi (Ghozali, 2013:105), adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- 3) Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: tolerance value dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Tolerance value  $< 0,10$  atau  $VIF > 10$  : terjadi multikolinieritas.
- Tolerance value  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$  : tidak terjadi multikolinieritas.

### **3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisa hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial. Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua variabel (Sugiyono 2016:275). Penelitian ini, menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas dalam penelitian lebih dari satu. Adapun persamaan regresi

linear berganda menurut Sugiyono (2016:275). Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pembangunan Infrastruktur  
 a = Konstanta  
 X<sub>1</sub> = Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa  
 X<sub>2</sub> = Partisipasi Masyarakat  
 e = *error term* (tingkat kesalahan)

### 3.10 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis statistik merupakan perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H<sub>0</sub>) dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga keputusan yang tegas, yaitu kalau H<sub>0</sub> ditolak H<sub>a</sub> diterima (Sugiyono (2016:87). Beberapa tahap pengujian hipotesis sebagai berikut:

#### 3.10.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji *t*)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan *t* tabel dan *t* hitung. Masing-masing *t* hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan *t* tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05 (Sumber:

Sugiyono, 2013: 250). Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial, digunakan uji signifikansi terhadap hipotesis yang ditentukan melalui uji  $t$  dengan pengujian sebagai berikut:

$H_{02}$  : nilai probabilitas  $t > 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di gampong Lampeudeu Baroh.

$H_{a2}$  : nilai probabilitas  $t < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di gampong Lampeudeu Baroh.

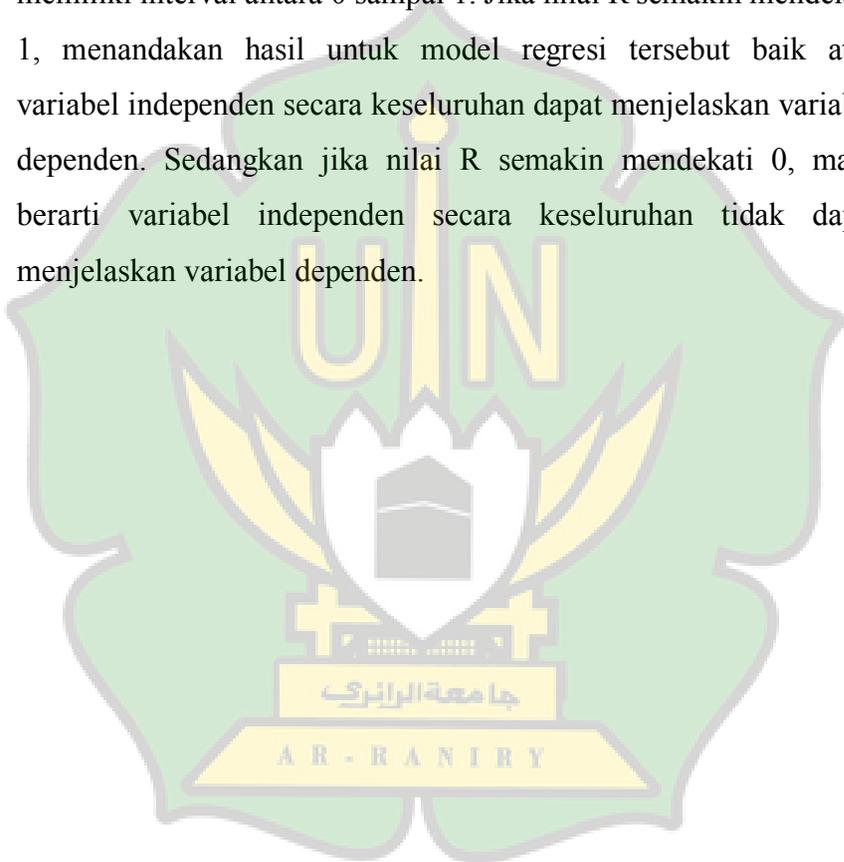
$H_{03}$  : nilai probabilitas  $t > 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di gampong Lampeudeu Baroh

$H_{a3}$  : nilai probabilitas  $t < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di gampong Lampeudeu Baroh.

### 3.9.2 Uji Koefisien Determinasi $r^2$

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat. Koefisien

determinasi juga menjelaskan besarnya masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki efek paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1, menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R semakin mendekati 0, maka berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum**

Gampong Lampeudeu Baroh merupakan sebuah gampong yang terletak dalam kemukiman gampong Lhang, dulu kemukiman gampong Lhang hanya memiliki 4 gampong oleh petua-petua gampong masa itu bersepakat ingin membentuk gampong baru karena gampong agak ke arah utara diberilah gampong dengan sebutan gampong Lampeudeu Baroh. Gampong Lampeudeu Baroh juga merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Masyarakat gampong Lampeudeu Baroh sebagian besar berpenghasilan utama dari hasil pertanian, pedagang, dan sebagian kecilnya berpenghasilan sebagai pegawai.

Luas wilayah Gampong Lampeudeu Baroh yaitu  $\pm$  180 Ha, yang terbagi dalam beberapa Dusun, yaitu Dusun Sejahtera, Dusun Sosial, dan Dusun Abadi. Dengan jumlah penduduk 901 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yanglainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintah serta menjadi tukang. Secara umum keadaan topografi Gampong Baroh merupakan dataran rata yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area perkebunan masyarakat dan sawah, dan pertambakan. Adapun batas Gampong Lampeudeu Baroh yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Blang Paseh

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lampeudeu Tunong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Tijue
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok Sawah.

Adapun orbitrasi (jarak Gampong dengan pusat kota kecamatan) Jarak tempuh ke Kota Kecamatan mencapai 4,5 kilometer dengan jarak waktu tempuh ke Kota Kecamatan : 15 menit. Jarak tempuh ke pusat Kota Kabupaten sepanjang 3 kilometer sedangkan waktu tempuh ke Kota Kabupaten selama 10 menit.

Kondisi fisik dasar Gampong (Jembatan, jalan, Jenis Lahan, dan Peta Budidaya, Fasilitas umum, Irigasi, Sumber Listrik, dll). Adapun kondisi sarana dan prasarana umum Gampong Lampeudeu Baroh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie secara garis besar sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Sarana dan Prasarana Gampong Lampeudeu Baroh**

No	Jenis	Volume	Kondisi
1	Meunasah Gampong	1 unit	Baik
2	Balai Pengajian	1 unit	Kurang Baik
3	Saluran Irigasi	1.400M	Saluran Tanah
4	Saluran tersier	300M	Saluran Tanah
5	Jalan Gampong	1000M	Jalan Aspal

6	WC Umum	2 unit	Tidak Baik
7	Drainase	500M	Saluran Tanah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui terdapat beberapa sarana dan prasarana pendukung di Gampong Lampeudeu Baroh yang terdiri dari bangunan meunasah, balai pengajian, saluran irigasi, jalan gampong, saluran tersier, WC dan Drainase yang secara keluruhan masih dapat dimanfaatkan. Gampong Lampeudeu Baroh memiliki fasilitas Gampong diantaranya, yaitu fasilitas ibadah/ agama yaitu meunasah yang terletak di Gampong Baroh itu sendiri, kantor keuchik, nama lorong, penerangan jalan utama desa gampong, fasilitas umum seperti tempat penampungan sampah, rumah bersalin, puskesmas, warnet, dan koperasi yang tidak ada di gampong Baroh dan fasilitas pendidikan yang hanya memiliki 1 TPA, dan tidak ada pustaka gampong sama sekali.

Penduduk Gampong Lampeudeu Baroh hingga saat ini berjumlah penduduk 901 Jiwa yang terdiri dari 438 penduduk laki-laki dan 463 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Gampong Lampeudeu Baroh**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
438	463	901

Dilihat dari kategori tingkat pendidikan penduduk Gampong Lampeudeu Baroh terdiri dari pendudukan yang berpendidikan SD, SMP, SMA dan bahkan sebagian besar juga berpendidikan sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gampong LampeudeuBaroh**

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Sarjana	Jumlah
87	345	301	301	50	1084

Berdasarkan tabel di tarlihat bahwa penduduk Gampong Lampeudeu Baroh rata-rata berpendidikan tamatan SD. Dari 1084 jiwa terdapat 345 jiwa berpendidikan SD, 301 berpendidikan SMP, 301 jiwa berpendidikan SMA, 87 jiwa berpendidikan tidak tamat SD dan hanya 50 orang yang berpendidikan Sarjana.

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Gampong Lampeudeu Baroh**

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	20 Orang
Buruh Tani	30 Orang
Pedagang	13 Orang
Montir	3 Orang

Tukang Bangunan	7 Orang
Buruh Bangunan	50 Orang
PNS	65 Orang
Swasta	4 Orang
Pensiunan	30 Orang
Industri Rumah Tannga	5 Orang
TNI	2 Orang
POLRI	7 Orang
Jumlah Keseluruhan	236 Orang

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

#### 4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan kemampuan kuesioner dalam mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen/kuesioner (Afifudin, 2009). Sudarmanto (2005:79) berpendapat bahwa kriteria yang digunakan atau batas minimum suatu instrument atau tingkat angket dinyatakan valid, apabila:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari analisis dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi pada table dengan tingkat kepercayaan yang telah dipilih.

2. Dibuat suatu ukuran tertentu, suatu instrument dinyatakan valid bila harga koefisien  $r_{tabel} < r_{hitung}$  maka dinyatakan valid, apabila  $r_{tabel} > r_{hitung}$  maka tidak valid (Arikunto, 2002:146).

Hasil pengujian instrumen penelitian dari segi validitas *item-total statistics* terhadap 100 responden sebagaimana tertera pada tabel berikut, menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai korelasi  $r$  lebih besar dari 0,197 (lihat tabel  $r_{tabel}$  (0,05) pada lampiran). Dengan demikian berarti item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Ringkasan dari hasil uji validitas disajikan dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas**

Variabel		rHitung	rTabel	Ket
<b>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1)</b>	1	0.586	0.197	Valid
	2	0.659	0.197	Valid
	3	0.728	0.197	Valid
	4	0.661	0.197	Valid
	5	0.647	0.197	Valid
	6	0.723	0.197	Valid
	7	0.686	0.197	Valid
	8	0.537	0.197	Valid
	9	0.730	0.197	Valid
	10	0.652	0.197	Valid
<b>Partisipasi Masyarakat (X2)</b>	11	0.704	0.197	Valid
	12	0.637	0.197	Valid
	13	0.703	0.197	Valid
	14	0.712	0.197	Valid

	<b>15</b>	0.703	0.197	Valid
	<b>16</b>	0.712	0.197	Valid
	<b>17</b>	0.564	0.197	Valid
	<b>18</b>	0.536	0.197	Valid
<b>Pembangunan Infrastruktur (Y)</b>	<b>19</b>	0.679	0.197	Valid
	<b>20</b>	0.688	0.197	Valid
	<b>21</b>	0.695	0.197	Valid
	<b>22</b>	0.649	0.197	Valid
	<b>23</b>	0.669	0.197	Valid
	<b>24</b>	0.653	0.197	Valid
	<b>25</b>	0.711	0.197	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dinyatakan valid, karena mempunyai koefisien korelasi di atas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,197 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

#### 4.1.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk (Baktiar, 2010). Indikator atau alat ukur dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan (*dependability*) dan dapat digunakan untuk meramalkan (*predictability*). Dengan demikian alat ukur tersebut akan

memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang tidak bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih-milih jawaban tertentu. Instrument yang reliabel akan menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Selanjutnya, hasil pengujian instrument penelitian dari segi reliabilitas *item-total statistics* terhadap 100 responden. Output hasil dari uji reliabilitas menggunakan program *SPSS Statistic 17.0* ringkasan dari hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b>Korfsien Reabilitas</b>	<b>Nilai Kritis</b>	<b>Keterangan</b>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1)	0.893	0.6	<b>Realiable</b>
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.892	0.6	<b>Realiable</b>
Pembangunan Infrastrukur (Y)	0.842	0.6	<b>Realiable</b>

Hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada Cronbach's Alpha. Data dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha  $> 0,6$ .

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kernormalan distribusinya. Tentunya kita juga sudah tahu, kalau data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas K-S:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	28.20
	Std. Deviation	8.265
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.797
Asymp. Sig. (2-tailed)		.550

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,550 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 4.8**  
**Uji Normalitas Partisipasi Masyarakat (X2)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Partisipasi Masyarakat
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	21.52
	Std. Deviation	6.134
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.652
Asymp. Sig. (2-tailed)		.788

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Partisipasi Masyarakat *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,788 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 4.9**  
**Uji Normalitas Pembangunan Infrastruktur (Y)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pembangunan Infrastruktur
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19.99
	Std. Deviation	5.482
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.062
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.633
Asymp. Sig. (2-tailed)		.817

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pembangunan Infrastruktur *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,817 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### 4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas) dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) Melihat nilai korelasi antar variabel independent. (2) Melihat nilai condition index dan eigenvalue. (3) Melihat nilai tolerance dan variance inflating factor (VIF). Dalam kesempatan kali ini kita akan memprektekkan cara melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menggunakan program SPSS.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF) Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap uji statistik yang dilakukan pasti ada dasar pengambilan keputusannya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF adalah sebagai berikut:

Pedoman Keputusan Berdasarkan Nilai VIF (Variance Inflation Factor):

1. Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.
2. Jika nilai VIF  $> 10,00$  maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.571	1.752
	Partisipasi Masyarakat	.571	1.752

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi VIF variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat sebesar 1,752 lebih kecil dari 10,00. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa data artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

#### 4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun jika variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pedoman Keputusan Berdasarkan Nilai Output *Coefficients*<sup>a</sup>:

1. Jika nilai *sig.* > 0,05 maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Jika nilai *sig.* < 0,05 maka artinya terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	3.568	.725		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-.018	.030	-.079	-.612	.542
Partisipasi Masyarakat	-.064	.040	-.209	-1.613	.110

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

Tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa *sig.* variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dan variabel Abs\_RES\_1 berperan sebagai variabel dependent diperoleh nilai sebesar 0,542 dan 0,110 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.12**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.521	1.010		1.506	.135
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.348	.041	.525	8.466	.000
Partisipasi Masyarakat	.402	.055	.450	7.258	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Tabel "Coefficients" memberikan informasi tentang persamaan regresi yaitu seberapa besar variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat memprediksi terhadap variabel Pembangunan Infrastruktur. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$  atau  $Y = 1,521 + 0,348X_1 + 0,402X_2$ .

### 4.3.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji F Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai probabilitas hasil

output Anova. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova:

1. Jika nilai Sig.  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Maka artinya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastrukur (Y).
2. Jika nilai Sig.  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Maka artinya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastrukur (Y).

Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel:

1. Jika nilai F hitung  $> F$  tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastrukur (Y).
2. Sebaliknya, Jika nilai F hitung  $< F$  tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastrukur (Y).

**Tabel 4.13**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2342.224	2	1171.112	179.526	.000 <sup>a</sup>
Residual	632.766	97	6.523		

Total	2974.990	99		
-------	----------	----	--	--

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y). Berdasarkan nilai F diatas diketahui nilainya yaitu 179,526. Karena nilai Sig. 288,643 lebih besar daripada F tabel dengan jumlah variabel bebas (df untuk pembilang) sebanyak 2 buah dan jumlah responden sebanyak 100 maka  $df=n-2=100-2=98$  (df untuk penyebut) didapatkan nilainya sebesar 3,09. Maka nilai Fhitung yaitu  $179,526 > 3,09$  sebagai Ftabel, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y).

#### 4.3.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji *t*)

Uji *t* merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear

multiples (berganda). Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y).

### 1. Analisis Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 4.14.**  
**Uji T Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap**  
**Pembanguna Infrastrukur**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.659	1.128		4.132	.000
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.544	.038	.820	14.163	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastrukur

Berdasarkan tabel program SPSS versi 17 di atas analisis uji T pengaruh Ankutabilitas Pegelolaan dana desa terhadap Pembangunan Infrastrukur dapat dilihat pada tabel “Baris Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kolom t” yaitu didapatkan nilai uji T sebesar 14,163 sehingga dapat dilakukan kaidah pengujiannya yaitu:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima :

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan perhitungan di atas,  $\alpha = 0,05$  dan  $n = 100$ , uji satu pihak;

$dk = n - 2 = 100 - 2 = 98$ , sehingga diperoleh  $t_{tabel} = 1,984$ .

Ternyata  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , atau  $14,163 > 1,984$ , maka  $H_0$  diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur.

## 2. Analisis Hipotesis Secara Parsial (Uji $t$ )

**Tabel 4.15.**  
**Uji T Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.724	1.228		3.846	.000
Partisipasi Masyarakat	.709	.055	.794	12.921	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan tabel program SPSS versi 17 di atas analisis uji  $T$  pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel “Baris Partisipasi Masyarakat dan Kolom  $t$ ” yaitu didapatkan nilai uji  $T$  sebesar 12,921 sehingga dapat dilakukan kaidah pengujiannya yaitu:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima :

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan perhitungan di atas,  $\alpha = 0,05$  dan  $n = 100$ , uji satu pihak;

$dk = n - 2 = 100 - 2 = 98$ , sehingga diperoleh  $t_{tabel} = 1,984$ .

Ternyata  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , atau  $12,921 > 1,984$ , maka  $H_0$  diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan

antara pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastrukur.

### 4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi

#### 4.3.2.1 Analisis Koefisien Determinasi Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastrukur

Perhitungan nilai koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variable bebas dalam menjelaskan varians dari variable terikatnya atau untuk menyatakan besarnya kontribusi Variabel  $X_1$  terhadap variable Y. Koefisien determinasi dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

**Tabel 4.16**  
**Analisis Koefisien Determinasi Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastrukur**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 <sup>a</sup>	.672	.668	3.156

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Analisis data penulis menggunakan bantuan program SPSS versi 17 untuk mengetahui nilai koefisien determinasi. Pada program SPSS versi 17 telah didapatkan nilai  $r^2$  (R Square) secara otomatis tanpa harus menggunakan persamaan di atas dan langsung mengalikannya dengan 100%. Jadi berdasarkan tabel program SPSS versi 17 pada analisis koefisien determinasi pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur didapatkan nilai  $r^2$  (R Square) yaitu 0,672 dan mengalikannya dengan 100%, maka  $0,672 \times 100 = 67,2\%$  sehingga dapat disimpulkan pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur sebesar 67,2%.

#### 4.3.2.2 Analisis Koefisien Determinasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur

**Tabel 4.17**  
**Koefisien Determinasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.794 <sup>a</sup>	.630	.626	3.351

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tabel program SPSS versi 17 pada analisis koefisien determinasi pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur didapatkan nilai  $r^2$  (r square) yaitu 0,630 dan mengalikannya dengan 100%, maka  $0,630 \times 100 = 63,0\%$

sehingga dapat disimpulkan pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur sebesar 63,0%.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

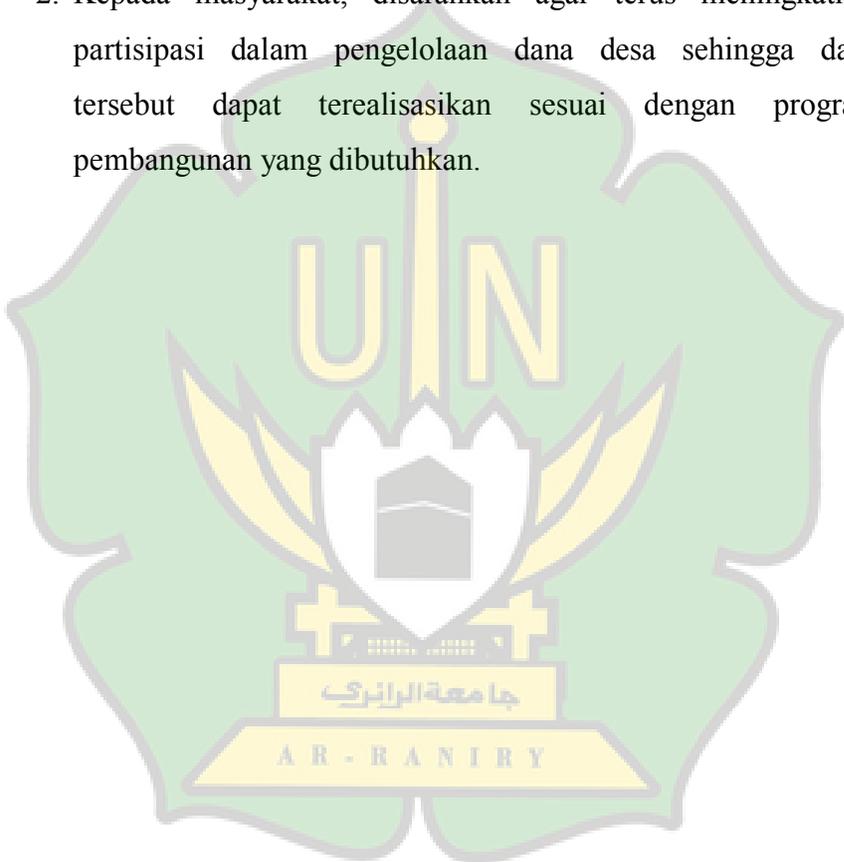
#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y), hal ini sebagaimana hasil uji  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $179,526 > 3,09$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa kuantabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Sedangkan hasil Uji t menunjukkan  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$ , atau  $14,163 > 1,984$ , artinya terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. Begitu juga partisipasi masyarakat berhubungan signifikan dengan pembangunan infrastruktur karena nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$ , atau  $12,921 > 1,984$ . Jika dilihat hasil analisis koefisien determinasi terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 67,2%, sedangkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 63,0%.

#### **5.2 Saran**

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, di antaranya:

1. Kepada apatarur Desa Lampeudeu Baroh, agar kedepannya lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sehingga terwujud pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya.
2. Kepada masyarakat, disarankan agar terus meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga dana tersebut dapat terealisasikan sesuai dengan program pembangunan yang dibutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul.(2015). *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6 No.1.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep,Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrawan, R dan Poppy Yaniawati. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Jamaluddin, Yanhar. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 6, No. 1.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* Jakarta: CIDES. Laporan UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP. NewYork.
- Krina, P. L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

- Nasihatun, Lina. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 1*.
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur. L . Fahri. (2017). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Dalam *Jurnal Publik Vol. 11, No. 1*.
- Poerwodarminto, W.J.S. (1978). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putriyanti, Aprisiami. (2012). *Penerapan Otonomi Daerah dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo*. Dalam *e Jurnal diakses tanggal 27 Mei 2015*.
- Ridwan. M. Tikollah, M.Yusuf A. Ngampo (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol.1, No. 1*.

- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers
- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, M. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Medan: PT. Grasindo Monoratama.
- Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta



## Lampiran 1

## KUESIONER

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**

**Responden No.** :

**A. Identitas Pribadi**

Nama : .....

Usia : ..... Tahun

Jenis kelamin : L/P

Pendidikan terakhir :

SD       SMP       SMA/SMK       D3

S1       S2       S3

Pekerjaan : .....

Jabatan : Perangkat/masyarakat

Pengalaman menjadi perangkat *gampong* : ..... Tahun

**B. Penelitian ini menginginkan pendapat saudara tentang prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Petunjuk pengisian, berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:**

1 = Sangat tidak setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5= Sangat setuju (SS)

### 1. 'Adl

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Distribusi dana desa lebih ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.					
2.	Dana desa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.					
3.	Pengelolaan dana desa ditempatkan sesuai posisi dan porsinya.					
4.	Dalam pengelolaan dana desa tidak mendzalimi salah satu pihak.					
5.	Masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program ADG					

### 2. Transparansi

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pemerintah terbuka dalam pengelolaan keuangan <i>gampong</i> sehinggamasyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan <i>gampong</i> yang jujur					

	dan benar.					
2.	Pemerintah <i>gampong</i> dapat mempertanggungjawabkan secara legal setiap dana desa yang dikelola.					
3.	Dalam pengelolaannya pemerintah <i>gampong</i> melibatkan kelembagaan <i>gampong</i> dan unsur masyarakat <i>gampong</i> .					
4.	Masyarakat percaya sepenuhnya kepada pemerintah <i>gampong</i> dalam mengelola dana desa.					
5.	Akses mengenai pengelolaan keuangan <i>gampong</i> mudah diperoleh.					

### 3. *Ma'ad*

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat mensejahterakan masyarakat <i>gampong</i> .					
2.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat <i>gampong</i> .					
3.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat					

	<i>gampong</i> .					
4.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat <i>gampong</i> .					
5.	Fasilitas umum yang digunakan masyarakat saat ini adalah hasil dari pengelolaan dana desa					

#### 4. Kesejahteraan Masyarakat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dalam proses administrasi di kantor <i>keucik</i> .					
2.	Fasilitas kesehatan <i>gampong</i> memadai.					
3.	Adanya bantuan pendidikan dari pihak <i>gampong</i> . جامعة الرانرب					
4.	Pemerintah <i>gampong</i> memfasilitasi sarana penghubung rehabilitasi rumah penduduk dengan pemerintah daerah.					
5.	Pemerintah <i>gampong</i> mendukung acara-acara adat di <i>gampong</i> .					

Lampiran 2

Skor Hasil Kuesioner

No	Adl					Transparansi					Ma'ad					Kesejahteraan Masyarakat				
	A1	A2	A3	A4	A5	T1	T2	T3	T4	T5	M1	M2	M3	M4	M5	K1	K2	K3	K4	K5
1	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3
2	5	4	5	4	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
3	4	4	5	1	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	3	1	1	4
4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
6	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
8	4	5	4	3	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	3	4
9	4	5	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4
10	4	3	5	4	5	5	5	5	3	4	5	5	5	4	3	4	3	4	3	5
11	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
13	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4
14	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
15	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5
16	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
17	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
19	4	4	4	4	3	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	3	4	2	4	3	4
21	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5
23	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5
24	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
26	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5
27	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
28	4	4	4	4	3	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5
29	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	2	4	4
30	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
31	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	2	4	4
32	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4
33	4	4	4	3	2	5	3	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	2	4	4
34	5	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4
35	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
36	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4
37	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4
38	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
39	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	5	5	4	4	3	5	3	3	5	4
41	5	4	4	4	2	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4
42	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4
43	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
44	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
45	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4
46	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4

## Correlations

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
V1 Pearson Correlation	1	.600	.544	.434	.412	.338
V1 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001
V1 N	100	100	100	100	100	100
V2 Pearson Correlation	.600	1	.638	.741	.521	.464
V2 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
V2 N	100	100	100	100	100	100
V3 Pearson Correlation	.544	.638	1	.688	.553	.490
V3 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
V3 N	100	100	100	100	100	100
V4 Pearson Correlation	.434	.741	.688	1	.554	.521
V4 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
V4 N	100	100	100	100	100	100
V5 Pearson Correlation	.412	.521	.553	.554	1	.515
V5 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
V5 N	100	100	100	100	100	100
V6 Pearson Correlation	.338	.464	.490	.521	.515	1
V6 Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
V6 N	100	100	100	100	100	100
V7 Pearson Correlation	.332	.305	.382	.410	.433	.692
V7 Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.000	.000	.000
V7 N	100	100	100	100	100	100
V8 Pearson Correlation	.333	.192	.357	.275	.345	.355
V8 Sig. (2-tailed)	.001	.056	.000	.006	.000	.000
V8 N	100	100	100	100	100	100
V9 Pearson Correlation	.459	.495	.468	.490	.436	.644
V9 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
V9 N	100	100	100	100	100	100
V10 Pearson Correlation	.265	.321	.418	.348	.270	.415
V10 Sig. (2-tailed)	.008	.001	.000	.000	.007	.000
V10 N	100	100	100	100	100	100
V11 Pearson Correlation	.309	.417	.442	.421	.387	.469
V11 Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000
V11 N	100	100	100	100	100	100
V12 Pearson Correlation	.198	.355	.418	.296	.329	.358
V12 Sig. (2-tailed)	.048	.000	.000	.003	.001	.000
V12 N	100	100	100	100	100	100
V13 Pearson Correlation	.212	.296	.422	.262	.309	.433
V13 Sig. (2-tailed)	.034	.003	.000	.009	.002	.000
V13 N	100	100	100	100	100	100
V14 Pearson Correlation	.239	.304	.421	.238	.356	.430
V14 Sig. (2-tailed)	.017	.002	.000	.017	.000	.000
V14 N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

		V7	V8	V9	V10	V11	V12
V1	Pearson Correlation	.332	.333	.459	.265	.309	.198
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.008	.002	.048
	N	100	100	100	100	100	100
V2	Pearson Correlation	.305	.192	.495	.321	.417	.355
	Sig. (2-tailed)	.002	.056	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V3	Pearson Correlation	.382	.357	.468	.418	.442	.418
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V4	Pearson Correlation	.410	.275	.490	.348	.421	.296
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.000	.003
	N	100	100	100	100	100	100
V5	Pearson Correlation	.433	.345	.436	.270	.387	.329
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.007	.000	.001
	N	100	100	100	100	100	100
V6	Pearson Correlation	.692	.355	.644	.415	.469	.358
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V7	Pearson Correlation	1	.562	.604	.423	.545	.336
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001
	N	100	100	100	100	100	100
V8	Pearson Correlation	.562	1	.491	.399	.378	.184
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.067
	N	100	100	100	100	100	100
V9	Pearson Correlation	.604	.491	1	.518	.585	.352
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V10	Pearson Correlation	.423	.399	.518	1	.821	.492
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V11	Pearson Correlation	.545	.378	.585	.821	1	.566
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
V12	Pearson Correlation	.336	.184	.352	.492	.566	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.067	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100
V13	Pearson Correlation	.453	.258	.414	.471	.487	.704
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V14	Pearson Correlation	.362	.262	.401	.428	.468	.762
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

	V13	V14	V15	V16	V17	V18
V1 Pearson Correlation	.212	.239	.307	.304	.513	.417
Sig. (2-tailed)	.034	.017	.002	.002	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
V2 Pearson Correlation	.296	.304	.270	.292	.386	.324
Sig. (2-tailed)	.003	.002	.007	.003	.000	.001
N	100	100	100	100	100	100
V3 Pearson Correlation	.422	.421	.480	.462	.412	.287
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.004
N	100	100	100	100	100	100
V4 Pearson Correlation	.262	.238	.232	.237	.315	.208
Sig. (2-tailed)	.009	.017	.020	.018	.001	.038
N	100	100	100	100	100	100
V5 Pearson Correlation	.309	.356	.344	.332	.214	.301
Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.001	.033	.002
N	100	100	100	100	100	100
V6 Pearson Correlation	.433	.430	.336	.362	.293	.276
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.003	.005
N	100	100	100	100	100	100
V7 Pearson Correlation	.453	.362	.350	.365	.231	.190
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.021	.058
N	100	100	100	100	100	100
V8 Pearson Correlation	.258	.262	.388	.290	.320	.356
Sig. (2-tailed)	.009	.009	.000	.003	.001	.000
N	100	100	100	100	100	100
V9 Pearson Correlation	.414	.401	.400	.419	.373	.303
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.002
N	100	100	100	100	100	100
V10 Pearson Correlation	.471	.428	.351	.404	.316	.423
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000
N	100	100	100	100	100	100
V11 Pearson Correlation	.487	.468	.370	.396	.291	.286
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	.004
N	100	100	100	100	100	100
V12 Pearson Correlation	.704	.762	.566	.629	.227	.208
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.023	.038
N	100	100	100	100	100	100
V13 Pearson Correlation	1	.823	.631	.672	.297	.306
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.003	.002
N	100	100	100	100	100	100
V14 Pearson Correlation	.823	1	.710	.764	.328	.274
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.006
N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

	V19	V20	V21	V22	V23	V24
V1 Pearson Correlation	.345	.382	.238	.444	.322	.267
V1 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.017	.000	.001	.007
V1 N	100	100	100	100	100	100
V2 Pearson Correlation	.292	.433	.296	.729	.301	.238
V2 Sig. (2-tailed)	.003	.000	.003	.000	.002	.017
V2 N	100	100	100	100	100	100
V3 Pearson Correlation	.350	.369	.374	.657	.421	.413
V3 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
V3 N	100	100	100	100	100	100
V4 Pearson Correlation	.379	.345	.232	.971	.290	.231
V4 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.020	.000	.003	.021
V4 N	100	100	100	100	100	100
V5 Pearson Correlation	.422	.353	.351	.541	.400	.397
V5 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
V5 N	100	100	100	100	100	100
V6 Pearson Correlation	.656	.398	.389	.482	.298	.271
V6 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	.006
V6 N	100	100	100	100	100	100
V7 Pearson Correlation	.966	.473	.317	.369	.280	.270
V7 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.005	.007
V7 N	100	100	100	100	100	100
V8 Pearson Correlation	.525	.307	.196	.236	.313	.296
V8 Sig. (2-tailed)	.000	.002	.050	.018	.002	.003
V8 N	100	100	100	100	100	100
V9 Pearson Correlation	.587	.536	.353	.469	.337	.316
V9 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.001
V9 N	100	100	100	100	100	100
V10 Pearson Correlation	.430	.764	.411	.351	.284	.260
V10 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	.009
V10 N	100	100	100	100	100	100
V11 Pearson Correlation	.504	.900	.399	.378	.284	.261
V11 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	.009
V11 N	100	100	100	100	100	100
V12 Pearson Correlation	.290	.527	.668	.251	.373	.423
V12 Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.012	.000	.000
V12 N	100	100	100	100	100	100
V13 Pearson Correlation	.434	.487	.784	.240	.533	.576
V13 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.016	.000	.000
V13 N	100	100	100	100	100	100
V14 Pearson Correlation	.322	.448	.920	.198	.591	.645
V14 Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.049	.000	.000
V14 N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

		V25	Total
V1	Pearson Correlation	.346	.586
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V2	Pearson Correlation	.476	.659
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V3	Pearson Correlation	.458	.728
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V4	Pearson Correlation	.516	.661
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V5	Pearson Correlation	.501	.647
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V6	Pearson Correlation	.953	.723
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V7	Pearson Correlation	.634	.686
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V8	Pearson Correlation	.291	.537
	Sig. (2-tailed)	.003	.000
	N	100	100
V9	Pearson Correlation	.603	.730
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V10	Pearson Correlation	.394	.652
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V11	Pearson Correlation	.419	.704
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V12	Pearson Correlation	.304	.637
	Sig. (2-tailed)	.002	.000
	N	100	100
V13	Pearson Correlation	.423	.703
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V14	Pearson Correlation	.401	.712
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100

## Correlations

		V1	V2	V3	V4	V5	V6
V15	Pearson Correlation	.307	.270	.480	.232	.344	.336
	Sig. (2-tailed)	.002	.007	.000	.020	.000	.001
	N	100	100	100	100	100	100
V16	Pearson Correlation	.304	.292	.462	.237	.332	.362
	Sig. (2-tailed)	.002	.003	.000	.018	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V17	Pearson Correlation	.513	.386	.412	.315	.214	.293
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.033	.003
	N	100	100	100	100	100	100
V18	Pearson Correlation	.417	.324	.287	.208	.301	.276
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.004	.038	.002	.005
	N	100	100	100	100	100	100
V19	Pearson Correlation	.345	.292	.350	.379	.422	.656
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V20	Pearson Correlation	.382	.433	.369	.345	.353	.398
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V21	Pearson Correlation	.238	.296	.374	.232	.351	.389
	Sig. (2-tailed)	.017	.003	.000	.020	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V22	Pearson Correlation	.444	.729	.657	.971	.541	.482
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V23	Pearson Correlation	.322	.301	.421	.290	.400	.298
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.003	.000	.003
	N	100	100	100	100	100	100
V24	Pearson Correlation	.267	.238	.413	.231	.397	.271
	Sig. (2-tailed)	.007	.017	.000	.021	.000	.006
	N	100	100	100	100	100	100
V25	Pearson Correlation	.346	.476	.458	.516	.501	.953
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.586	.659	.728	.661	.647	.723
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

		V7	V8	V9	V10	V11	V12
V15	Pearson Correlation	.350	.388	.400	.351	.370	.566
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V16	Pearson Correlation	.365	.290	.419	.404	.396	.629
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V17	Pearson Correlation	.231	.320	.373	.316	.291	.227
	Sig. (2-tailed)	.021	.001	.000	.001	.003	.023
	N	100	100	100	100	100	100
V18	Pearson Correlation	.190	.356	.303	.423	.286	.208
	Sig. (2-tailed)	.058	.000	.002	.000	.004	.038
	N	100	100	100	100	100	100
V19	Pearson Correlation	.966	.525	.587	.430	.504	.290
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.003
	N	100	100	100	100	100	100
V20	Pearson Correlation	.473	.307	.536	.764	.900	.527
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V21	Pearson Correlation	.317	.196	.353	.411	.399	.668
	Sig. (2-tailed)	.001	.050	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V22	Pearson Correlation	.369	.236	.469	.351	.378	.251
	Sig. (2-tailed)	.000	.018	.000	.000	.000	.012
	N	100	100	100	100	100	100
V23	Pearson Correlation	.280	.313	.337	.284	.284	.373
	Sig. (2-tailed)	.005	.002	.001	.004	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V24	Pearson Correlation	.270	.296	.316	.260	.261	.423
	Sig. (2-tailed)	.007	.003	.001	.009	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V25	Pearson Correlation	.634	.291	.603	.394	.419	.304
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.002
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.686	.537	.730	.652	.704	.637
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

	V13	V14	V15	V16	V17	V18	
V15	Pearson Correlation	.631	.710	1	.884	.491	.446
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V16	Pearson Correlation	.672	.764	.884	1	.418	.375
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V17	Pearson Correlation	.297	.328	.491	.418	1	.770
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
V18	Pearson Correlation	.306	.274	.446	.375	.770	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100
V19	Pearson Correlation	.434	.322	.318	.356	.223	.230
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.000	.026	.022
	N	100	100	100	100	100	100
V20	Pearson Correlation	.487	.448	.342	.390	.348	.390
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V21	Pearson Correlation	.784	.920	.642	.746	.309	.330
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.001
	N	100	100	100	100	100	100
V22	Pearson Correlation	.240	.198	.199	.225	.305	.243
	Sig. (2-tailed)	.016	.049	.047	.025	.002	.015
	N	100	100	100	100	100	100
V23	Pearson Correlation	.533	.591	.778	.694	.422	.442
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V24	Pearson Correlation	.576	.645	.828	.729	.426	.415
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V25	Pearson Correlation	.423	.401	.284	.332	.265	.289
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.001	.008	.004
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.703	.712	.703	.712	.564	.536
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

		V19	V20	V21	V22	V23	V24
V15	Pearson Correlation	.318	.342	.642	.199	.778	.828
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.047	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V16	Pearson Correlation	.356	.390	.746	.225	.694	.729
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.025	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V17	Pearson Correlation	.223	.348	.309	.305	.422	.426
	Sig. (2-tailed)	.026	.000	.002	.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V18	Pearson Correlation	.230	.390	.330	.243	.442	.415
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.001	.015	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V19	Pearson Correlation	1	.505	.350	.401	.317	.308
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.002
	N	100	100	100	100	100	100
V20	Pearson Correlation	.505	1	.457	.371	.322	.300
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.002
	N	100	100	100	100	100	100
V21	Pearson Correlation	.350	.457	1	.260	.677	.676
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.009	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V22	Pearson Correlation	.401	.371	.260	1	.323	.265
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.009		.001	.008
	N	100	100	100	100	100	100
V23	Pearson Correlation	.317	.322	.677	.323	1	.942
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
V24	Pearson Correlation	.308	.300	.676	.265	.942	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.000	.008	.000	
	N	100	100	100	100	100	100
V25	Pearson Correlation	.664	.418	.431	.539	.364	.336
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.679	.688	.695	.649	.669	.653
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

		V19	V20	V21	V22	V23	V24
V15	Pearson Correlation	.318	.342	.642	.199	.778	.828
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.047	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V16	Pearson Correlation	.356	.390	.746	.225	.694	.729
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.025	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V17	Pearson Correlation	.223	.348	.309	.305	.422	.426
	Sig. (2-tailed)	.026	.000	.002	.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V18	Pearson Correlation	.230	.390	.330	.243	.442	.415
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.001	.015	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V19	Pearson Correlation	1	.505	.350	.401	.317	.308
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.002
	N	100	100	100	100	100	100
V20	Pearson Correlation	.505	1	.457	.371	.322	.300
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.002
	N	100	100	100	100	100	100
V21	Pearson Correlation	.350	.457	1	.260	.677	.676
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.009	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
V22	Pearson Correlation	.401	.371	.260	1	.323	.265
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.009		.001	.008
	N	100	100	100	100	100	100
V23	Pearson Correlation	.317	.322	.677	.323	1	.942
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
V24	Pearson Correlation	.308	.300	.676	.265	.942	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.000	.008	.000	
	N	100	100	100	100	100	100
V25	Pearson Correlation	.664	.418	.431	.539	.364	.336
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.679	.688	.695	.649	.669	.653
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

## Correlations

		V25	Total
V15	Pearson Correlation	.284	.703
	Sig. (2-tailed)	.004	.000
	N	100	100
V16	Pearson Correlation	.332	.712
	Sig. (2-tailed)	.001	.000
	N	100	100
V17	Pearson Correlation	.265	.564
	Sig. (2-tailed)	.008	.000
	N	100	100
V18	Pearson Correlation	.289	.536
	Sig. (2-tailed)	.004	.000
	N	100	100
V19	Pearson Correlation	.664	.679
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V20	Pearson Correlation	.418	.688
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V21	Pearson Correlation	.431	.695
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V22	Pearson Correlation	.539	.649
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V23	Pearson Correlation	.364	.669
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	100	100
V24	Pearson Correlation	.336	.653
	Sig. (2-tailed)	.001	.000
	N	100	100
V25	Pearson Correlation	1	.711
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Total	Pearson Correlation	.711	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**UJI REABILITAS****Reliability**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.893	10

RELIABILITY

```

/VARIABLES=V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

**Reliability**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	8

RELIABILITY

```

/VARIABLES=V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

```

/MODEL=ALPHA.

## Reliability

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

### Scale: ALL VARIABLES

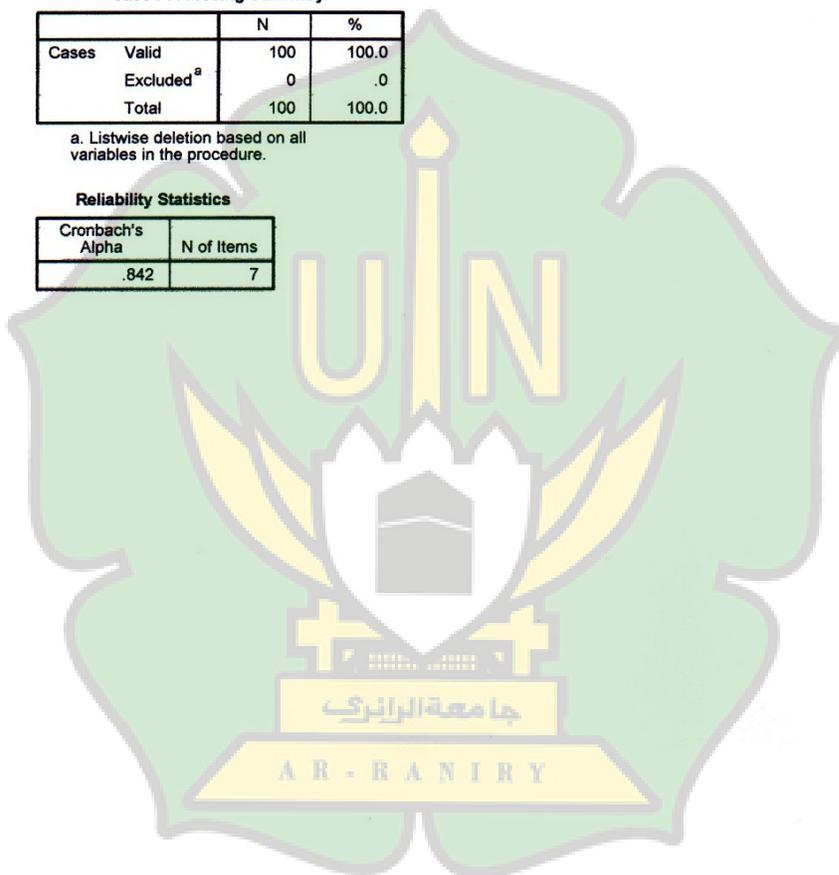
#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	7



**UJI NORMALITAS****NPar Tests**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	28.20
	Std. Deviation	8.265
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.797
Asymp. Sig. (2-tailed)		.550

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPAR TESTS

/K-S(NORMAL)=Total\_X2

/MISSING ANALYSIS.

**NPar Tests**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Partisipasi Masyarakat
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	21.52
	Std. Deviation	6.134
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.652
Asymp. Sig. (2-tailed)		.788

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPAR TESTS

/K-S(NORMAL)=Total\_Y

/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

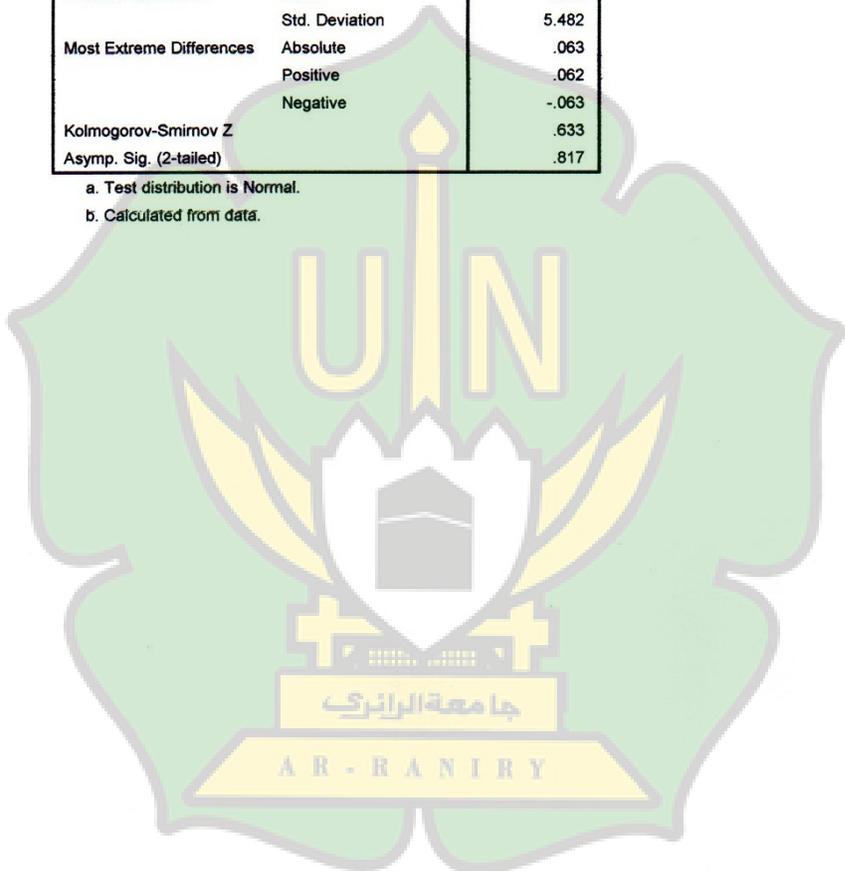
[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pembangunan Infrastruktur
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	19.99
	Std. Deviation	5.482
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.062
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.633
Asymp. Sig. (2-tailed)		.817

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT ABS_RES_1
/METHOD=ENTER Total_X1 Total_X2.

```

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

#### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		Enter

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3.568	.725
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-.018	.030
	Partisipasi Masyarakat	-.064	.040

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Standardized Coefficients		
		Beta	t	Sig.
1	(Constant)		4.922	.000
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-.079	-.612	.542
	Partisipasi Masyarakat	-.209	-1.613	.110

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Total_Y
/METHOD=ENTER Total_X1 Total_X2.

```

### UJI MULTIKOLINEARITAS

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

#### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		Enter

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.571	1.752
	Partisipasi Masyarakat	.571	1.752

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

#### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat
1	1	2.930	1.000	.01	.01	.00
	2	.043	8.233	.98	.21	.13
	3	.026	10.561	.01	.78	.87

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Total_Y
/METHOD=ENTER Total_X1 Total_X2.

```

### UJI REGRESI LINIER BERGANDA

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

#### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.	Enter

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.521	1.010
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.348	.041
	Partisipasi Masyarakat	.402	.055

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		1.506	.135
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.525	8.466	.000
	Partisipasi Masyarakat	.450	7.258	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

## REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Total_Y
/METHOD=ENTER Total_X1.

```

## UJI T

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		Enter

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	4.659	1.128
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.544	.038

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		4.132	.000
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.820	14.163	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

## REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Total_Y
/METHOD=ENTER Total_X2.

```

## Regression

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat	.	Enter

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	4.724	1.228
	Partisipasi Masyarakat	.709	.055

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		3.846	.000
	Partisipasi Masyarakat	.794	12.921	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

**ANALISIS DETERMINASI****Regression**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.	Enter

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 <sup>d</sup>	.672	.668	3.156

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1998.587	1	1998.587	200.595	.000 <sup>d</sup>
	Residual	976.403	98	9.963		
	Total	2974.990	99			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

**REGRESSION**

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Total_Y
/METHOD=ENTER Total_X2.

```

**Regression**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat	.	Enter

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.794 <sup>a</sup>	.630	.626	3.351

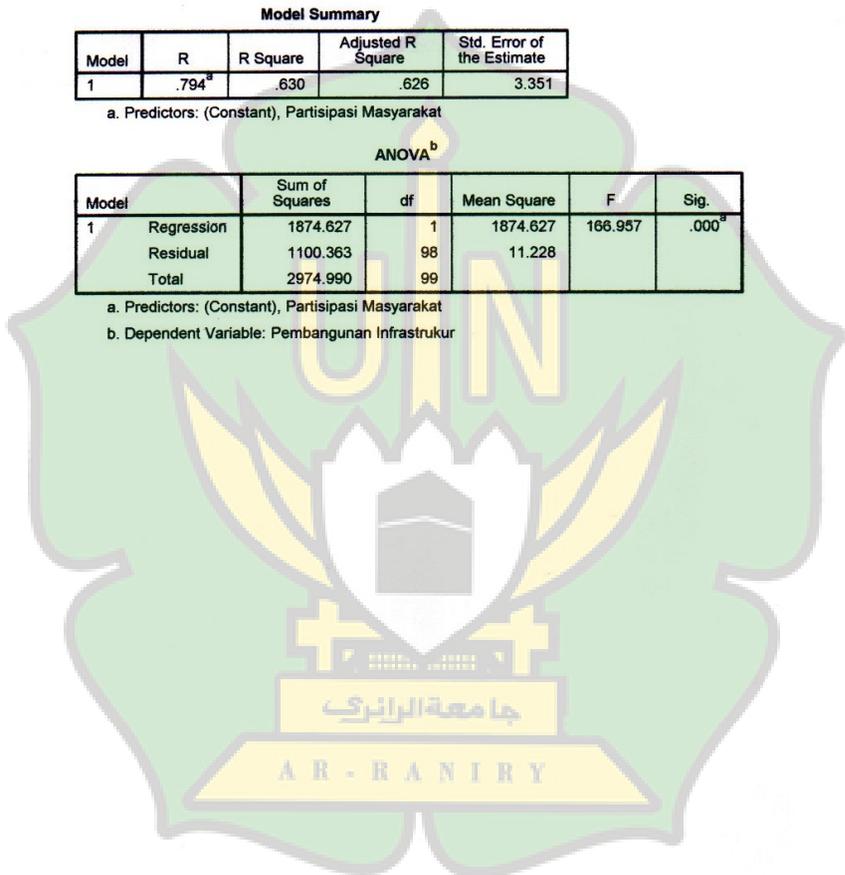
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1874.627	1	1874.627	166.957	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1100.363	98	11.228		
	Total	2974.990	99			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur



**UJI KORELASI****Correlations**

[DataSet1] D:\Pustaka\Data\Ekonomi\Baru\Data.sav

**Correlations**

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat	Pembangu n Infrastrukur
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	1	.655	.820
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
Partisipasi Masyarakat	Pearson Correlation	.655	1	.794
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Pembangunan Infrastruktur	Pearson Correlation	.820	.794	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

